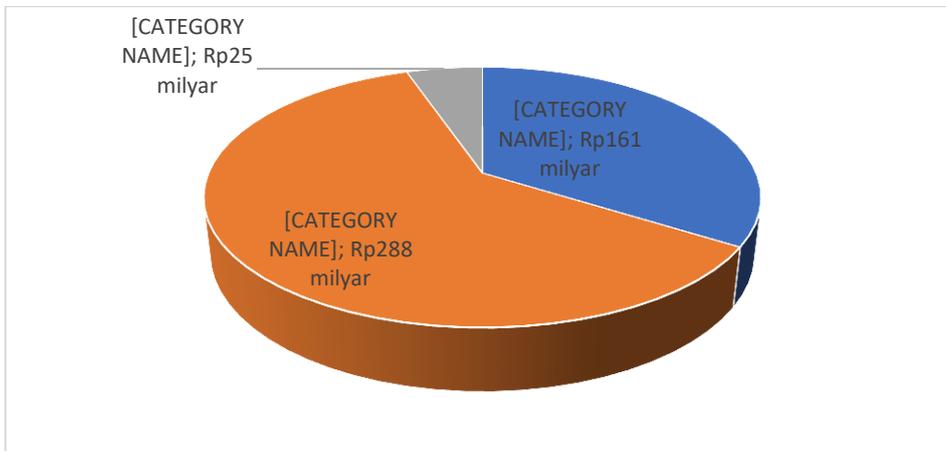


Jenis Berkas	: Bahan Rilis Fitra Provinsi Riau	No. Arsip	: PR.Sep - 2020/ 10
Judul	Dampak covid-19 terhadap keuangan daerah Ta. 2020”	Tanggal	: 10-Sep-2020
Sub Judul	: Anggaran Covid Rp 474 milyar, pengelolaan belum transparan	Tahun	: 2020
		Penulis	: *FITRA RIAU*

“Anggaran Covid Rp 474 milyar, pengelolaan belum transparan”

Fitra Riau - Kasus covid di Provinsi Riau terus terjadi peningkatan, per/tanggal 9 September 2020 total kasus mencapai 2.968 orang. Kondisi ini tentu berdampak pada semua sektor, terutama sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan. Selain itu, kondisi keuangan daerah semakin menurun dikarenakan terjadi penyesuaian pendapatan dan belanja daerah.

Upaya pemerintah provinsi Riau untuk mengatasi dampak covid-19, salah satunya adalah melakukan realokasi dan refocusing anggaran, tercatat alokasi anggaran untuk penanganan covid mencapai Rp474 milyar, yang digunakan untuk penanganan kesehatan Rp161 milyar, jaring pengaman sosial Rp288 milyar dan pemulihan ekonomi Rp25 milyar.



Data Olahan Fitra : Sumber; DPJK – Kemenkeu

Dengan alokasi anggaran untuk penanganan covid yang semakin besar mencapai Rp474 milyar, maka dalam penggunaannya harus dikelola secara transparan dan akuntabel, mengingat sampai saat ini publik tidak mendapatkan informasi yang utuh dalam penanganan covid, bahkan dengan alokasi anggaran covid yang semakin besar tidak berdampak pada penurunan kasus covid itu sendiri, sehingga publik patut mencurigai adanya potensi penyelewengan dalam pengelolaan anggaran covid di Provinsi Riau.

Selain itu, pemerintah provinsi Riau tidak patuh terhadap mandate kebijakan SBK menteri keuangan dan Mendagri, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk merealokasikan belanja barangjasa dan modal masing-masing sebesar 50%. Faktanya, realokasi belanja barangjasa hanya mencapai 33% dan belanja modal sebesar 43%, dengan demikian, pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan covid, apalagi pandemic covid sudah berlangsung selama 6 bulan.

APBD Riau 2020 turun mencapai 22 persen

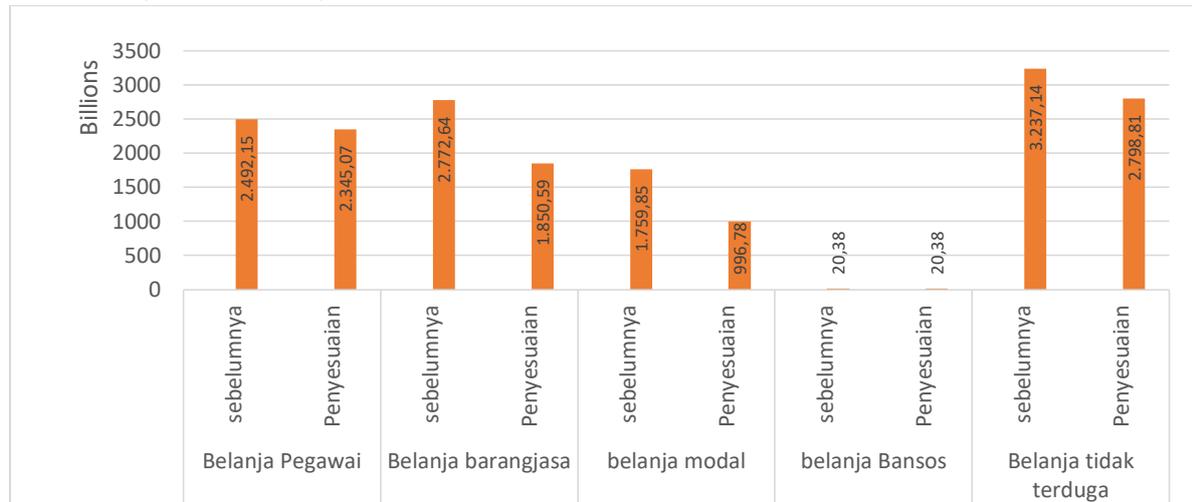
Kondisi fiskal daerah akibat dampak covid-19 terjadi penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, pada APBD 2020 terjadi penurunan mencapai 22% dari sebelumnya mencapai Rp10,28

triliun turun menjadi Rp8,01 triliun. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi pembangunan daerah, terutama untuk meningkatkan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar 22%, dari sebelumnya diproyeksi sebesar Rp3,9 triliun turun menjadi Rp3,1 triliun. Begitu juga pada pendapatan dana transfer atau dana bagi hasil turun mencapai 14%, dari sebelumnya diproyeksi sebesar Rp6,2 triliun turun menjadi Rp5,2 triliun. Penyesuaian pendapatan diprediksikan tidak akan tercapainya target dan proyeksi pendapatan daerah dikarenakan adanya pemberian stimulus ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari DJPK kementerian, belanja daerah terjadi rasionalisasi cukup besar pada belanja modal mencapai 43%, barang jasa 33%, belanja pegawai 6%, Belanja tidak terduga turun 13%, sedangkan belanja bantuan sosial tidak terjadi penyesuaian, kondisi ini tentu bertolak belakang dengan alokasi anggaran penanganan covid yang seharusnya terjadi peningkatan, terutama pada belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

Grafik; Penyesuaian belanja daerah Tahun 2020



Data Olahan Fitra Sumber; DJPK- Kemenkeu

Penyesuaian pada belanja pegawai hanya dikurangkan sekitar 4-6%, kebutuhan anggaran untuk penanganan covid-19 lebih besar, disamping itu, justru belanja barangjasa dan modal jauh lebih besar dilakukan pengurangan yang seharusnya dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, belanja OPD belum maksimal disesuaikan, seperti DPRD, Sekda, yang hanya dikurangi 25%. padahal di OPD itu sebagian besar kegiatan adalah belanja habis pakai, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan lain-lain. Maka pemda Riau harus lebih cermat dalam melakukan penyesuaian belanja termasuk belanja pegawai dan belanja masing-masing OPD, yang kemudian untuk difokuskan pada penanganan covid-19.

Realisasi APBD Riau 2020 Semester I hanya 25 persen,

kondisi ini sangat berdampak pada pembiayaan program-program prioritas daerah, termasuk pada penanganan covid-19, realisasi belanja 2020 pada semester 1 hanya mampu terserap sebesar 25% atau sebesar Rp2,5 triliun, dan realisasi pendapatan daerah hanya mampu mencapai 38% atau senilai Rp3,8 triliun. Rendahnya serapan APBD 2020 tentu berdampak pada kebutuhan anggaran

untuk penanganan covid-19, sehingga beberapa kebutuhan belanja tidak dapat dibiayai karna keterbatasan anggaran.

Bahkan sampai saat ini pemda Riau belum melakukan perubahan APBD 2020, yang seharusnya dapat disesuaikan kebutuhan anggaran untuk penanganan covid-19. Konsekuensinya tentu sangat merugikan pemda karna berkonsekuensi pada penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020, sehingga dampaknya adalah semakin terbatasnya anggaran daerah.

Untuk itu, Fitra Riau merekomendasikan kepada Pemprov Riau untuk segera melakukan langkah-langkah cepat penanganan covid-19;

- Tren kasus positif covid-19 terus terjadi peningkatan, untuk itu, pemda di Riau lebih memfokuskan anggarannya untuk penanganan covid-19, khususnya untuk penanganan kesehatan, JPS dan pemulihan ekonomi.
- Penggunaan anggaran untuk penanganan covid harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat alokasi anggaran cukup besar sehingga potensi penyalahgunaan semakin besar.
- Khusus penyediaan jaring pengaman sosial, pemda harus mempercepat penyaluran dan pemerataan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.
- Untuk pemulihan ekonomi, pemda harus memprioritaskan pelaku ekonomi menengah kebawah yang benar-benar terdampak.
- momentum perubahan APBD 2020, pemda Riau harus memperhatikan penyesuaian secara serius dan memprioritaskan belanja pada untuk penanganan covid-19.

Contac Person

Tarmizi Deputi Fitra : 0852-7817-5515

Taufik Manager Advokasi : 0853-6343-0444